

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH
MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA DI KOTA MALANG
(Studi Kasus Pada Tahun 1998 – 2012)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Mukhamad Rizal Azaini
105020100111031**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN
INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MALANG
(Studi Kasus Pada Tahun 1998 – 2012)**

Yang disusun oleh :

Nama : Mukhamad Rizal Azaini
NIM : 105020100111031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Januari 2014

Malang, 20 Januari 2014

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE.,MS.

NIP. 19520415 197412 1 001

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM DAN INVESTASI TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MALANG
(Studi Kasus Pada Tahun 1998 – 2012)**

Mukhamad Rizal Azaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono 165 Malang
Email:the_mofast@yahoo.com

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. M. Pudjihardjo, SE., MS.

ABSTRAK

Persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan ini bermula dari tingginya angkatan kerja Indonesia akibat dari pertumbuhan penduduk yang banyak menyebabkan penawaran tenaga kerja akan meningkat. Tingginya penawaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang pada tahun 1998 – 2012. Sedangkan untuk tujuan yang kedua yaitu variabel mana yang mempunyai pengaruh yang paling dominan bila dibandingkan dengan variabel yang lainnya dalam penyerapan tenaga kerja, dapat diselesaikan menggunakan metode analisis regresi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data *time series* tahun 1998-2012. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BPS Kota Malang dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Metode *Ordinary Least Square* (OLS). Uji hipotesis menggunakan pengujian secara simultan (uji F), parsial (uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (R^2). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, upah minimum kota (UMK), investasi, kesempatan kerja di Kota Malang tahun 1998 – 2012.

Hasil penelitian pada model pertama menunjukkan pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap variabel kesempatan kerja (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya adalah 0,014. Maka dapat diambil informasi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (X_1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,014%.

Pada model kedua menunjukkan pengaruh variabel upah minimum (X_2) terhadap variabel kesempatan kerja (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya adalah 0,196. Maka dapat diambil informasi kenaikan upah minimum (X_2) akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya upah minimum sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,196%.

Pada model ketiga menunjukkan pengaruh variabel investasi (X_3) terhadap variabel kesempatan kerja (Y) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ dengan nilai koefisiennya adalah 0,168. Maka dapat diambil informasi semakin tinggi investasi (X_3) akan mengakibatkan semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya investasi sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,168%. Dalam persamaan variabel investasi merupakan variabel dengan peningkatan betanda positif paling tinggi daripada variabel bebas yang lain.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, UMK, Investasi, Kesempatan Kerja

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pelaksanaan tersebut dikelompokkan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional (Djojohadikusumo, 1994). Pembangunan ekonomi merupakan satu kesatuan tujuan pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi ini diperlukan karena Indonesia mempunyai penduduk yang banyak yang menyebabkan angkatan kerja yang banyak yang berarti penawaran tenaga kerja akan meningkat. Tingginya penawaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di daerah, pengelolaan suatu daerah harus sesuai dengan potensi daerah. Maka pengelolaan daerah harus sesuai dengan sektor ekonomi yang menjadi prioritas oleh masing-masing daerah, maka kedepannya akan tercipta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang optimal. Menurut Todaro (2000) perlunya melakukan pembangunan pada potensi yang dimiliki suatu daerah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi.

Menurut Djojohadikusumo (1994) bahwa pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dengan demikian, pengertian tentang pembangunan ekonomi menyangkut perubahan kuantitatif pada produksi dan pendapatan.

Dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan unsur investasi. Secara teori, investasi yang masuk ke suatu daerah berarti menambah modal dalam kegiatan perekonomian. Penambahan modal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika arus investasi ke suatu daerah berlangsung terus menerus dan dalam jangka panjang serta dibarengi dengan ekonomi yang berdaya saing tinggi, maka investasi akan meningkatkan penawaran melalui peningkatan stok modal yang ada. Selanjutnya, peningkatan stok modal ini akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output atau melakukan kegiatan produksi yang menambah aktivitas perekonomian daerah tersebut. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa modal akan meningkatkan produktivitas perekonomian wilayah. Kondisi yang demikian didukung pendapat Todaro (2000) bahwa pertumbuhan ekonomi negara atau wilayah sangat tergantung dari tingkat akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang dialokasikan dalam perekonomian. Artinya semakin tinggi akumulasi modal maka semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu upah merupakan tujuan dari setiap tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penerapan upah di daerah dengan menggunakan kebijakan upah minimum untuk sektor formal. Menurut Devanto dan Putu (2011) bahwa Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang mempunyai banyak sektor unggulan yang menjadi potensi untuk pemasukan daerah. Sebesar 61 persen dari penduduk usia produktif kota ini mencari kerja di sektor perdagangan. Selain perdagangan, Kota Malang juga dikenal dengan industrinya yaitu industri makanan, minuman, kerajinan emas dan perak, garmen, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang”

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan daerah dalam Era Otonomi Daerah

Menurut Sjahrizal (2008:228) bahwa dilaksanakannya otonomi daerah sejak tanggal 1 januari 2001 sesuai dengan Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisir dan sangat didominasi oleh pemerintahan pusat mulai ditinggalkan. Sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan didaerhnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut, tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam, mulai berubah dan cenderung bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijaksanaan nasional mulai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah.

Sentralisasi yang demikian besar ternyata telah menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat serius. Pertama, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah yang sangat besar. Dengan demikian, banyak potensi daerah, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, daerah yang potensi daerahnya kebetulan sesuai dengan kebijaksanaan nasional akan dapat bertumbuh secara cepat. Sedangkan daerah yang potensinya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar yang selanjutnya cenderung pula mendorong terjadinya keresahan sosial di daerah. Kedua, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumber daya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya provinsi yang kaya sumber daya alam, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata masih sangat rendah dan ketinggalan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (2009:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Sedangkan menurut Djojohadikusumo (1993:1) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Paham pertumbuhan digunakan dalam teori dinamika sebagaimana hal itu dikembangkan oleh para pemikir Neo-Keynes dan Neo-Klasik. Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan, bisa saja berlangsung tanpa terwujudnya pembangunan.

Menurut Sukirno dalam Ruliansyah (2013) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Menurut ekonom Klasik dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.
2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Tenaga Kerja

Menurut mazhab klasik dalam Mulyadi (2003:191) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal, dan kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila *utility* yang diterima lebih besar daripada disutility tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha, nilai tambah output barang dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Menurut mazhab ini, semua tenaga kerja akan terserap dalam perekonomian, atau akan selalu terjadi full employment. Dalam kondisi tersebut, menurut Jean Baptist Say, semua barang dan jasa yang diproduksi akan habis dibeli oleh masyarakat (*supply creates its own demand*).

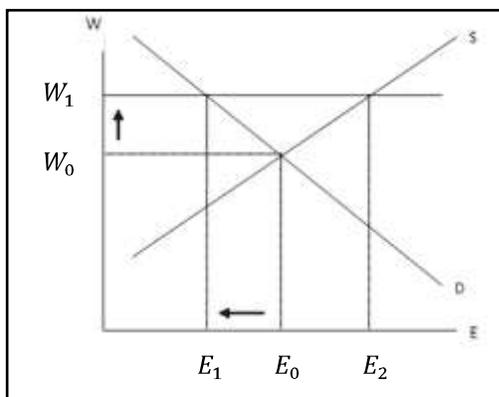
Menurut Simanjuntak (1985:3) bahwa seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau Labour Force, sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan Total Labour Force. Konsep Total Labour Force ini digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 16 tahun.

Sedangkan proses dimana terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja disebut pasar kerja. Seseorang yang telah masuk dalam pasar kerja adalah mereka yang bersedia untuk menawarkan jasanya kelancaran proses produksi.

Pasar Kompetitif

Menurut Devanto dan Putu (2011) bahwa dalam konteks pasar tenaga kerja kompetitif atau persaingan sempurna, pengusaha dan tenaga kerja dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pasar kerja, sehingga alokasi tenaga kerja dapat terjadi pada suatu ekuilibrium yang efisien. Dalam pasar ini, dengan menggunakan pendekatan maksimisasi profit, pengusaha akan mempekerjakan karyawannya sampai *marginal cost* mereka sama dengan *marginal revenue product of labour*.

Gambar 2.1 :Kurva Upah Minimum di Pasar Kompetitif



Sumber : Devanto dan Putu, 2011

Gambar 2.1 menunjukkan kondisi keseimbangan harga dan tenaga kerja dilihat dari model kompetitif. Kurva permintaan tenaga kerja digambarkan menurun (*downward sloping*) menunjukkan marginal revenue product of labour (MRP). MRP yang menurun ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap output (produktivitas) akan meningkat pada tingkat yang lambat laun menurun (*diminishing rate*) ketika tenaga kerja ditambah. Di sisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah menaik (*upward sloping*) menggambarkan alternatif-alternatif penerimaan yang diterima oleh pekerja. Tingkat keseimbangan dari tingkat upah dan tenaga kerja ditunjukkan oleh pertemuan antara kurva permintaan (D) dan kurva penawaran (S). Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1, tingkat upah keseimbangan adalah W_0 , sedangkan E_0 keseimbangan tenaga kerja. Seandainya upah minimum berada di atas tingkat keseimbangan W_1 , kondisi ini akan menciptakan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) menggambarkan bahwa hanya E_1 yang akan dipekerjakan dengan jumlah pekerja yang tersedia sebesar E_2 .

Kelebihan penawaran ini menyebabkan turunnya tenaga kerja yang akan dipekerjakan dari E_0 (tingkat keseimbangan) ke E_1 . E_1 secara otomatis menunjukkan tingkat keseimbangan yang baru setelah adanya kebijakan upah minimum di dalam pasar kompetitif. Di daerah atau negara yang mana kebijakan upah minimum diterapkan secara penuh, maka kelebihan penawaran ini bisa digambarkan dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Tetapi untuk negara yang sedang berkembang, dimana tidak tersedianya *social benefit* bagi penganggur dan juga cukup besarnya sektor informal maka kondisi kelebihan penawaran tenaga kerja ini tidak selalu menunjukkan pengangguran yang meningkat, tetapi berpindahnya pekerja dari sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) ke sektor informal (yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum).

Tingkat Upah Minimum

Menurut Devanto dan Putu (2011) menerangkan bahwa upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah. Dalam hal ini upah minimum adalah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Namun dalam peraturan pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan, sehingga seringkali menimbulkan kontroversi bagi pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap sendiri adalah tunjangan yang diberikan secara tetap tanpa melihat tingkat kehadiran pekerja ataupun output, seperti misalnya tunjangan keluarga tetap dan tunjangan yang berdasar pada senioritas. Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Menurut Sumarsono dalam Devanto dan Putu (2011) mendefinisikan terdapat dua unsur penting dari upah minimum yaitu adalah: a) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja. b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Pada awalnya kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan besaran biaya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Dalam perkembangannya kemudian, dalam era otonomi daerah, dalam menentukan besaran tingkat upah minimum beberapa pertimbangannya adalah: (a) biaya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), (b) Indeks Harga Konsumen (IHK), (c) tingkat upah minimum antar daerah, (d) kemampuan, pertumbuhan, dan keberlangsungan perusahaan, (e) kondisi pasar kerja, dan (f) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Menurut Sumarsono dalam Devanto dan Putu (2011) mengemukakan pula bahwa upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun kenyataannya justru menunjukkan bahwa hanya sedikit perusahaan yang secara sadar dan sukarela terus menerus berusaha meningkatkan penghidupan karyawannya, terutama pekerja golongan yang paling rendah. Di pihak lain, karyawan melalui serikat pekerja dan/atau dengan mengundang pemerintah selalu menuntut kenaikan upah. Tuntutan seperti itu yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk: (a) mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi; (b) menggunakan teknologi yang lebih padat modal; dan/atau (c) menaikkan harga jual barang yang kemudian justru akan mendorong inflasi.

Investasi

Menurut Sukirno dalam Ismail (2009), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-

barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Teori Harrod Domar dalam adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapat nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru (Suryana, 2000:66).

Menurut Ismail (2009) Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

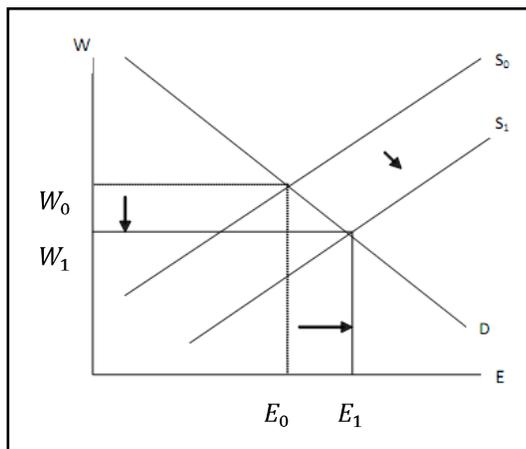
Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Teori Model Dual Sektor

Menurut Welch dalam Devanto dan Putu (2011) menemukan teori model dual sektor, dimana dikembangkan dari perluasan model kompetitif. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat dua sektor di dalam ekonomi (segmentasi ekonomi) yaitu sektor formal (yang tercover oleh kebijakan upah minimum) dan sektor informal (sektor yang tidak tercover oleh kebijakan upah minimum) dengan mobilitas yang sempurna antar dua sektor tersebut. Sebelum adanya kebijakan upah minimum kedua sektor ini diasumsikan menerima upah pada tingkat yang sama yaitu W_0 .

Menurut Sumarsono dalam Devanto dan Putu (2011) penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal. Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap oleh sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak distribusi pendapatannya akan justru memburuk. ILO menambahkan bahwa sektor informal adalah bagian dari ekonomi pasar yang memproduksi secara legal barang dan jasa untuk dijual dan mendapatkan penghasilan. Sektor ini meliputi tenaga kerja yang terdapat di dalamnya, baik yang terdapat pada perusahaan informal (usaha kecil yang tidak terdaftar secara resmi) dan diluar dari itu. Wirausaha informal dan pekerja sektor ini memiliki karakter penting, yaitu tidak dikenali dan tidak dilindungi oleh ketentuan upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan.

Gambar 2.2 : Upah Minimum di Sektor Informal



Sumber : Devanto dan Putu, 2011

Pada gambar 2.2 menjelaskan bahwa seandainya kemudian ada kebijakan upah minimum pada sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan tingkat keseimbangan upah W_0 . Hal ini akan menyebabkan sektor formal menjadi lebih dipilih oleh pekerja dibandingkan sektor informal. Dengan kata lain kebijakan upah minimum ini menyebabkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labour*) pada sektor formal. Berdasarkan model dual sektor ini kelebihan penawaran pada sektor formal akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Kondisi ini digambarkan oleh pergeseran dari kurva penawaran dari sektor informal dari S_0 ke S_1 .

Pada kenyataannya pergeseran tenaga kerja juga dimungkinkan dari pasar informal menuju pasar formal, hal ini terjadi bilamana di pasar formal tercipta kesempatan kerja kembali sehingga mengundang pekerja di pasar informal untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran kurva penawaran tenaga kerja di pasar informal menjadi S_0 sehingga tingkat upah di pasar informal mengalami kenaikan. Pada kenyataannya seorang tenaga kerja dapat dengan mudah berpindah dari satu sektor ke sektor yang lain karena terciptanya kesempatan kerja dan tingkat upah yang lebih baik. Perpindahan tenaga kerja antar sektoral tersebut akan berhenti bila tingkat upah yang diharapkan (*expected wage*) antar sektor tersebut sama (Devanto dan Putu, 2011).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode yang akan digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif melalui analisis regresi linier berganda metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang dianalisis dengan software Eviews 7. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang pada tahun 1998 – 2012. Sedangkan untuk tujuan yang kedua yaitu variabel mana yang mempunyai pengaruh yang paling dominan bila dibandingkan dengan variabel yang lainnya dalam penyerapan tenaga kerja, dapat diselesaikan menggunakan metode analisis regresi. Ruang lingkup penelitian ini adalah Kota Malang dengan periode 1998-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data sekunder tersebut meliputi data mengenai laju pertumbuhan ekonomi, jumlah kesempatan kerja, upah minimum, dan jumlah investasi dimana semua data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Malang dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Variabel Kesempatan Kerja

Dari hasil penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh signifikan bertanda positif secara parsial dan simultan. Nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0.005 pada α (level of significance) 5%, nilai koefisiennya adalah 0,014. Maka dapat diambil informasi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (X_1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,014%.

Kontribusi pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebagian besar didukung oleh 2 sektor yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor industri pengolahan. Jadi kedua sektor ini mempunyai kontribusi penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula.

Menurut Teori pertumbuhan jalur cepat (*Tumpike*) diperkenalkan oleh Samuelson dalam Tarigan (2009 : 54) bahwa setiap wilayah perlu melihat sektor/ komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Selain itu, perlu diperhatikan pandangan beberapa ahli ekonomi Schumpeter dalam Tarigan (2009 : 54) yang mengatakan bahwa kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha yang tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Angkatan kerja yang tidak tertampung dapat menciptakan instabilitas keamanan sehingga investor tidak berminat melakukan investasi dan ekonomi menjadi mandek. Perekonomian yang mandek membuat makin banyak pencari kerja tidak tertampung sehingga instabilitas bertambah parah. Apabila jaminan keamanan berusaha sudah tidak ada, investor yang sudah ada pun akan merelokasinya. Apabila hal ini terjadi akan terjadi depresi ekonomi dan kemakmuran akan menurun (Tarigan 2009 : 54).

Maka pemerintah Kota Malang harus memperhatikan sektor dan sub sektor unggulan untuk selalu dikembangkan, selain itu sektor dan sub sektor yang kurang mendominasi untuk lebih ditingkatkan supaya terjadi perputaran ekonomi antar sektor primer, sekunder maupun tersier. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Variabel Upah Minimum terhadap Variabel Kesempatan Kerja

Dari hasil penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa variabel upah minimum (X_2) berpengaruh signifikan bertanda negatif secara parsial dan simultan. Nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0.018 pada α (level of significance) 5%, nilai koefisiennya adalah -0,196. Maka dapat diambil informasi kenaikan upah minimum (X_1) akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya upah minimum sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,196%.

Jika diuraikan bahwa bertambahnya nilai upah ini bisa menyebabkan meningkatkan kehidupan layak seorang pekerja, tetapi jika peningkatan nilai upah terlalu tinggi yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas kerja akan mendorong pengusaha untuk : (a) mengurangi penggunaan tenaga kerja dengan menurunkan produksi ; (b) menggunakan teknologi yang lebih padat modal ; dan/atau (c) menaikkan harga jual barang yang kemudian justru akan mendorong inflasi (Sumarsono dalam Putu dan Devanto, 2011). Semua ini terjadi dikarenakan beban yang terlalu tinggi yang ditanggung suatu badan usaha akibat bertambahnya nilai upah dan biaya bahan baku yang nilainya tidak stabil.

Ada empat pihak dalam penentuan nilai upah ini bisa terbentuk yaitu pemerintah, pengusaha, akademisi, dan tenaga kerja. Peciptaan kebijakan upah minimum ditetapkan berdasarkan besaran biaya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Dalam perkembangannya kemudian, dalam era otonomi daerah, dalam menentukan besaran tingkat upah minimum beberapa pertimbangannya adalah: (a) biaya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), (b) Indeks Harga Konsumen (IHK), (c) tingkat upah minimum antar daerah, (d) kemampuan, pertumbuhan, dan keberlangsungan perusahaan, (e) kondisi pasar kerja, dan (f) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Data upah minimum Kota Malang dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya dengan tujuan supaya terciptanya pemenuhan kebutuhan bagi para pekerja. Kebijakan penentuan nilai upah dari tahun ke tahun selalu direvisi dikarenakan setiap tahun terjadi inflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) maka terjadi peningkatan nilai upah berdasarkan nilai Konsumsi Harian Layak (KHL). Dengan peningkatan ini diharapkan terciptanya kesejahteraan bagi pekerja, namun peningkatan upah ini harus secara realistis supaya nantinya tidak terjadi pengurangan tenaga kerja akibat peningkatan nilai upah. Karena pada persamaan regresi ertanda negatif dan dapat diartikan ada kecenderungan tidak searah.

Maka kebijakan pemerintah Kota Malang dalam penetapan nilai upah harus secara tepat untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga tidak terjadi pengurangan tenaga kerja.

Pengaruh Variabel Investasi terhadap Variabel Kesempatan Kerja

Dari hasil penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa variabel investasi (X_3) berpengaruh signifikan bertanda positif secara parsial dan simultan. Nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0.005 pada α (level of significance) 5%, nilai koefisiennya adalah 0,168. Maka dapat diambil informasi semakin tinggi investasi (X_3) akan mengakibatkan semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja. Dari analisis regresi, bertambahnya investasi sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,168%. Dalam persamaan variabel investasi merupakan variabel dengan peningkatan bertanda positif paling tinggi daripada variabel bebas yang lain.

Dalam hal ini investasi dibagi menjadi dua bagian yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Di dalam teori pertumbuhan Harold Domar yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan output dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, melalui penambahan investasi guna meningkatkan kemampuan SDM (human capital) atau guna memperbaiki teknologi. Yang pada akhirnya akan meningkatkan rasio kapital, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Kaitan tingkat suku bunga dengan investasi adalah tingkat bunga yang tinggi tersebut akan berpengaruh negatif terhadap investasi, yaitu menyebabkan turunnya investasi. Dalam *The General Theory*, Keynes menganggap bahwa investasi salah satunya ditentukan suku bunga. Perusahaan-perusahaan akan menjalankan investasi jika investasi itu nampak menguntungkan, yaitu jika besarnya pengembalian (returns, keuntungan atau hasil) melampaui suku bunga atas dana yang dapat dipinjam untuk membiayai investasi itu (Partadiredja dalam Anggrainy, 2013). Hasanah dan Sunyoto dalam Anggrainy (2013) mengemukakan bahwa bagaimana investasi yang ditanamkan akan memberi keuntungan di masa yang akan datang, maka selayaknya adalah biaya untuk membayar bunga harus lebih rendah daripada tingkat pengembaliannya atau pendapatan investasinya. Atau dengan kata lain tingkat pengembalian (rate of return) investasi harus lebih tinggi daripada pembayaran tingkat bunganya.

Menurut Keynes tingkat suku bunga adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara selain inflasi. Suku bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). Penawaran dan permintaan uang itu sendiri salah satunya terjadi akibat adanya kenaikan tingkat upah. Selanjutnya suku bunga dapat mempengaruhi keseimbangan antara simpanan masyarakat dan investasi pada sektor riil. Menurut teori klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. Tingkat suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi suku bunga. Semakin rendah suku bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan oleh para pengusaha. Semakin rendah suku bunga semakin banyak investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Dengan banyaknya investasi pada sektor riil ini kemudian akan mempengaruhi jumlah industri, lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Matz dalam Anggrainy, 2013).

Maka pada hakikatnya pengelolaan investasi daerah diatur oleh daerah, sedangkan tingkat suku bunga diatur oleh nasional. Maka peran daerah dalam meningkatkan penerimaan investasi adalah dengan meningkatkan daya saing investasi dengan cara penyediaan fasilitas dan sarana bagi investor supaya menciptakan iklim sejuk bagi investor.

Dalam upaya meningkatkan investasi harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan prasarana bagi investor. Maka kebijakan yang diperlukan Kota Malang untuk menciptakan iklim sejuk bagi para investor antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan perijinan- perijinan daerah melalui sistem pelayanan tunggal (*one stop service*) atas ijin-ijin lokasi dan pembebasan hak atau pembelian tanah.
2. Meningkatkan Pelayanan perijinan atau perpanjangan ijin kerja tenaga asing.
3. Penyediaan data potensi Kota Malang dalam bentuk profil investasi serta profil proyek.
4. Penyediaan lokasi wilayah atau kawasan industri untuk memudahkan perencanaan dan penyediaan prasarana atau upaya pengendalian pencemaran limbah.
5. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan investor.

Jadi variabel investasi merupakan variabel dengan peningkatan betanda positif paling tinggi daripada variabel bebas yang lain. Maka peran daerah dalam meningkatkan penerimaan investasi adalah dengan meningkatkan daya saing investasi dengan cara penyediaan fasilitas dan sarana bagi investor supaya menciptakan iklim sejuk bagi investor.

Variabel Dominan

Dari hasil penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa variabel upah minimum merupakan variabel dominan daripada variabel bebas lainnya dalam model regresi. Dalam analisis regresi, jumlah koefisien upah minimum sebesar 0,196.

Maka dapat diambil informasi bahwa variabel upah minimum mempunyai pengaruh paling besar. Dikarenakan Upah minimum merupakan tujuan dari pekerja dalam mencari penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Namun, seringkali pekerja menuntut nilai upah yang terlalu tinggi. Jika tingkat upah yang dinaikkan terlalu tinggi, maka akan berakibat kepada bertambahnya nilai beban yang ditanggung badan usaha untuk membayar upah pekerja dan juga bisa berdampak kepada pengurangan tenaga kerja. Dalam analisis regresi diatas, Semakin besar peningkatan upah minimum akan mengakibatkan semakin besar pula pengurangan tenaga kerja.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Malang selama kurun waktu 1998 - 2012. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Dari hasil regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap variabel kesempatan kerja.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh positif terhadap variabel kesempatan kerja. Namun variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap variabel kesempatan kerja.
3. Variabel upah minimum merupakan variabel dominan terhadap variabel kesempatan kerja di Kota Malang.

Saran

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pemerintah diharapkan lebih meningkatkan output sektor dan sub sektor supaya penyerapan tenaga kerja meningkat terus dari tahun ke tahun.
2. Pembangunan ekonomi di tiap – tiap daerah di Kota Malang dengan memperhatikan sektor dan sub sektor unggulan untuk selalu dikembangkan, selain itu sektor dan sub sektor yang kurang mendominasi untuk lebih ditingkatkan supaya terjadi perputaran ekonomi antar sektor primer, sekunder maupun tersier. Dan pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Berkaitan dengan Upah Minimum Kota (UMK), pemerintah Kota Malang harus menetapkan kebijakan upah secara tepat untuk meningkatkan kehidupan yang layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan.
4. Berkaitan dengan Investasi, Pemerintah Kota Malang sebaiknya lebih menggalakkan investasi yang bersifat padat karya dari pada yang bersifat padat modal yang nantinya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
5. Diperlukan Kebijakan dari Kota Malang dalam menciptakan iklim sejuk bagi para investor untuk lebih meningkatkan jumlah investasi. Upaya penikatan investasi harus diiringi dengan penyediaan fasilitas dan prasarana yang memadai dan selalu ditingkatkan supaya nantinya dapat meningkatkan produksi dan akibatnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja Kota Malang.
6. Pemerintah Kota Malang lebih menggalakkan dan meningkatkan program-program yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan misalnya penikatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan intensitas bursa kerja, dan memberi kemudahan pemberian modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
7. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama untuk menambah jangka waktu (periode) penelitian dan menggunakan variabel-variabel yang lain sehingga hasil berikutnya lebih berkembang dan lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, Kholifah. 2013. Analisis Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Kesempatan Kerja dan Investasi (Studi Kasus pada Kota Malang Periode 2001 - 2011). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Cetakan ketujuh. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Ismail, Muhammad. 2009. *Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian terhadap Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian*. SKRIPSI Fakultas Manajemen Agribisnis Universitas Pertanian Bogor. Bogor.
- Devanto dan Putu. 2011. Kebijakan Upah Minimum untuk Perekonomian yang Berkeadilan: Tinjauan UUD 1945. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*. Vol. 5 No. 2.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Cetakan pertama. Jakarta : LP3ES.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*.
- Ruliansyah, Denny. 2013. Analisis Hubungan antara PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), Realisasi Investasi, Desentralisasi Fiskal dan Kesempatan Kerja di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda*.
- Simanjuntak, Payaman, J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sjahrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan Pertama. Sumatera Barat: Badouse Media.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cetakan kelima. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Todaro, M. P, dan Smith, S, C. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Jakarta : Erlangga.